



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

NOMOR : 03 /Kep.Karo/SETDA-ORG/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi perlu membentuk Tim Penyusunan laporan tersebut;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan dimaksud;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI;**

- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
- KETIGA : Setiap perkembangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar melapor ke Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dto

Drs. MAHRUP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19730228 199201 1001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG TATA USAHA Tgl. _____	KABAG TATALAKSANA Tgl. _____
Abdillah, SE	Saliman, S. E.
NIP. 19850302 201101 1 004	NIP. 19671010 199103 1 016

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI
 NOMOR : Kep.Karo/SETDA-ORG/2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (LKjIP) 2022 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
 TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM TIM SEBAGAI
1.	Drs.Mahrup, M.Si Nip. 19730228 199201 1001	Plt.Kepala Biro	Penanggung Jawab/ Ketua Tim Penyusun
2.	Saliman,S.E Nip. 19671010 199103 1 016	Kabag Tatalaksana	Wakil Ketua
3.	Ismail, S.E Nip. 19740217 199803 1 001	Kabag RB dan Akuntabilitas Kinerja	Koordinator bidang teknis
4.	Drs.Mahrup, M.Si Nip. 19730228 199201 1001	Kabag Kelembagaan dan Anjab	Koordinator bidang administrasi
5.	Abdillah, S. E. Nip. 19850302 201101 1 004	Kasubbag TU	Anggota
6.	R. Andri Riandi, S.IP., M.M. Nip. 19820619 201001 1 011	Kasubbag Akuntabilitas Kinerja	Anggota
7.	Lamhot T.S., S. E. Nip. 19770915 200012 1 003	Kasubbag Reformasi Birokrasi	Anggota
8.	Drs. Achyar Nip. 19681027 199009 1 001	Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan	Anggota
9.	Vivi Novelgia, S. E. Nip. 19840512 201101 2 005	Pelaksana	Anggota
10.	Eliza, S. E. Nip. 19760916 201001 2 008	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Jambi
 Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dto

Drs. MAHRUP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19730228 199201 1001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG TATA USAHA Tgl._____	KABAG TATALAKSANA Tgl._____
Abdillah, SE NIP. 19850302 201101 1 004	Saliman, S. E. NIP. 19671010 199103 1 016



Pemerintah Provinsi Jambi

**BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI JAMBI**

**Jl. Jend. A. Yani No. 1
Telanaipura Jambi**

**LAPORAN KINERJA (LKj)
BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi tahun 2022. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintahan selama satu tahun Anggaran. Proses Kinerja Biro Organisasi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJ Biro Organisasi. Adapun tujuan penyusunan LKJ untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi di masing-masing perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJ juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas di Lipkup Pemerintah.

Akhirnya, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 ini. Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, Biro Organisasi selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan seperti meningkatkan kompetensi/ kualitas aparatur yang dalam penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi, besar harapan semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

Jambi, Januari 2023

PLT.KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dto

Drs. MAHRUP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19730228 199201 1001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022, merupakan bagian dari rentang waktu implementasi Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jambi yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan gambaran capaian kinerja selama pelaksanaan anggaran Tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

Rencana kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang dilaksanakan sesuai dengan Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang membawahi 3 (tiga) Bagian, dan 9 (sembilan) Sub Bagian yang bertanggung jawab melaksanakan rencana kinerja Biro Organisasi Setda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa hasil capaian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selama Tahun 2022 telah berhasil mencapai sasaran prioritas yakni pelaksanaan penataan kelembagaan daerah, tatalaksana, pelayanan publik, koordinasi akuntabilitas, anjab dan ABK serta Budaya Kerja lingkup Setda Provinsi Jambi yang ditargetkan, meskipun secara keseluruhan belum dapat dicapai pada Tahun 2022 ini.

Disadari bahwa capaian kinerja dimaksud, baik yang telah berhasil maupun yang masih perlu peningkatan merupakan bahan pelajaran yang sangat berharga dalam peningkatan kinerja unit kerja di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis atas kinerja Tahun 2022 tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah penting sebagai strategi dalam pemecahan permasalahan pada masa-masa yang akan datang, dan tidak terlepas dari strategi kebijakan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi antara lain :

1. Mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dengan fokus pada koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan secara maksimal.
2. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaksanaan.
3. Konsistensi dalam melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak lain dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Tetap memegang teguh azas efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang tersedia serta tepat waktu dan sasaran dalam setiap langkah pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan dan pembangunan di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	9
D. Komposisi Pegawai.....	10
E. Permasalahan Utama	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan	14
2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Setda Provinsi Jambi	14
2.1.1 Tujuan	14
2.1.2 Sasaran	15
2.2. Visi dan Misi	15
2.3. Strategi.....	16
2.4. Kebijakan	16
2.5. Perjanjian Kinerja	16
2.6. Program dan Kegiatan	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
A. Capaian Kinerja Biro	52
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi merupakan unsur staf di jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Secara Organisasi, Biro Organisasi Setda ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

BAB I berisi :

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Komposisi Pegawai
- E. Permasalahan Utama
- F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 2, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pergub Nomor 25 Tahun 2020 tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam peniapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah, Biro Organisasi mempunyai fungsi, antara lain :

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Biro Organisasi dibantu oleh :

- a. Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab.
- b. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Kepala Bagian Tatalaksana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Analisis Jabatan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- c. menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan;
- d. menyusun analisis beban kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- e. menyiapkan koordinasi program penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- g. mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan pemanfaatan hasil analisis jabatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan analisis beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. membina penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota;
- j. membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas :

- a. mengkaji dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator dan 8 (delapan) area perubahan (manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik);
- b. mengoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan;
- c. membina terhadap 8 (delapan) kelompok kerja area perubahan pada pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten/Kota dan;
- d. melaksanakan fasilitasi dalam verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 (delapan) area perubahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Akuntabilitas Kinerja, mempunyai tugas:

- a. mengkaji dan analisis di bidang akuntabilitas kinerja;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja;
- c. melaksanakan monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sakip Kabupaten/Kota;
- d. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Budaya Kerja, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan budaya kerja;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan budaya kerja;
- d. memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, bagian tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbaggian Tatalaksana Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Pelayanan Publik, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pelayanan publik;
- e. mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik;
- f. mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih lanjut;
- g. menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
- h. mengoordinasikan pelayanan dasar;
- i. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan Daerah;
- j. melaksanakan monitoring di bidang pelayanan publik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

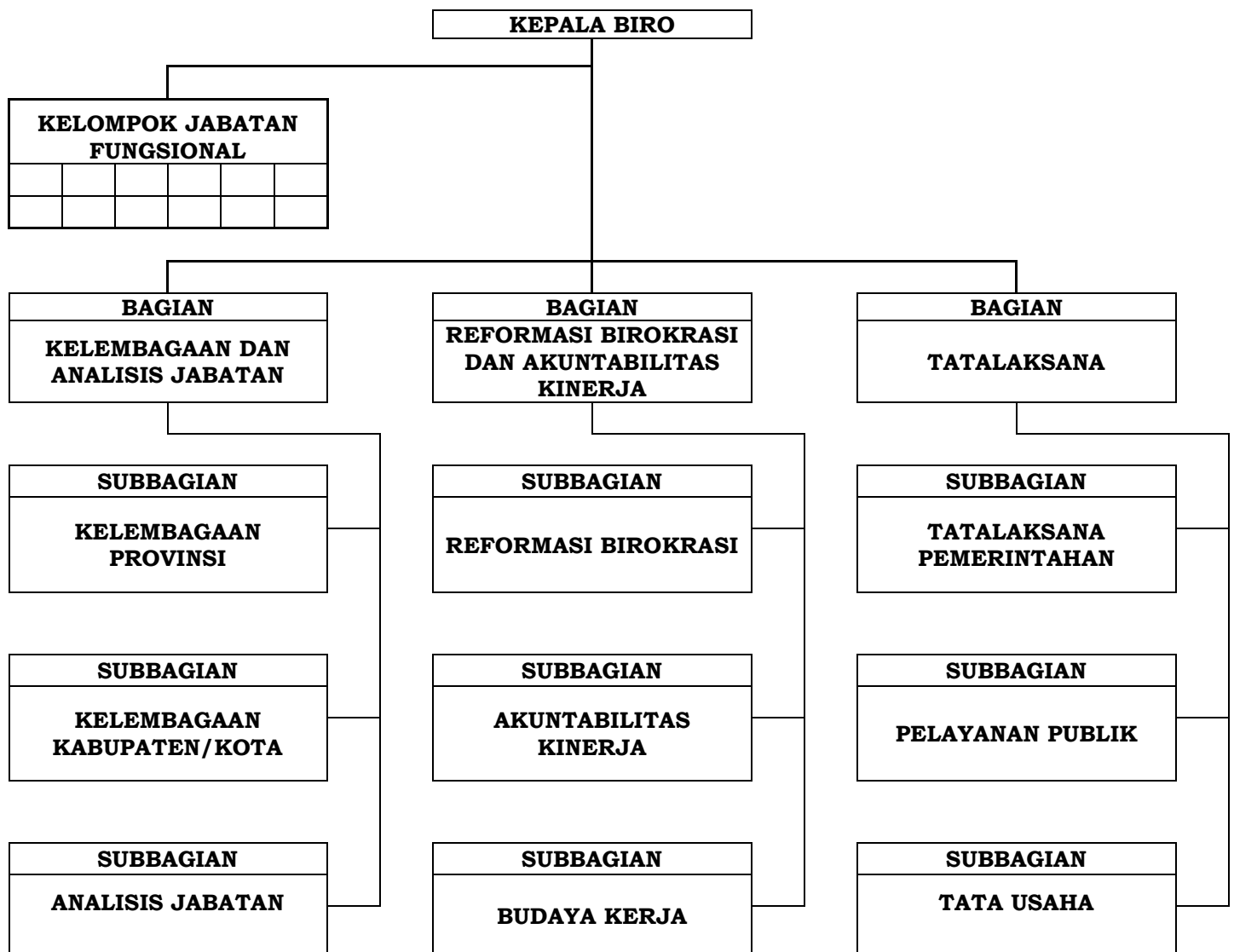
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;

- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Jambi, maka Susunan Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) sub bagian.



Kepala Bagian sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi serta memimpin Sub Bagian yang berada di bawahnya masing-masing. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan penataan kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, kepada seluruh perangkat daerah dalam provinsi Jambi.

D. KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi didukung oleh PNS Sebanyak 30 (tiga puluh) Orang dan Pegawai tidak tetap sebanyak 10 (Sepuluh) orang, keadaan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1). Berdasarkan Golongan

Golongan	Orang	%
IV	4	13
III	24	80
II	2	7
Jumlah	30	100

2). Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Orang	%
Eselon II.b	-	-
Eselon III.a	3	25
Eselon IV.a	9	75
Jumlah	12	100

3). Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Orang	%
S2	5	17
S1	22	73
DIII	-	-
SLTA	2	7
SMP	1	3
Jumlah	30	100

4). Berdasarkan Jabatan dan Diklat Struktural

Golongan	Pim II	Pim III	Pim IV
Eselon II.b	-	-	-
Eselon III.a	-	5	-
Eselon IV.a	-	-	4
Jumlah	-	5	4

5). Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Orang	%
Pria	18	56,8
Wanita	12	43,2
Jumlah	30	100

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI BIRO ORGANISASI

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah tingginya dinamika perubahan kebijakan dalam peraturan perundang- undangan dalam kebijakan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, serta tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin besar mengikuti perkembangan jaman sehingga perlu kinerja pemerintah yang optimal dalam menyusun kebijakan bidang tersebut.

F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Biro Organisasi setda Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKJ yang diawali dengan uraian singkat tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi setda Provinsi Jambi, serta dimuat landasan hukum penyusunan LKJ dan aspek Strategi/ isu strategi, keterkaitan dengan RENSTRA dan RPJMD provinsi Jambi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi,Misi,Tujuan merupakan penjabaran Visi biro yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan perjabaran kinerja biro Organisasi setda provinsi Jambi.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja biro serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan yang tepat sangat diperlukan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur sebagai upaya menciptakan peningkatan kinerja pelaksanaan pembangunan khususnya pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, dan sebagai acuan dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

BAB II berisi :

- A. Perencanaan
- B. Visi dan Misi
- C. Strategi
- D. Kebijakan

Penjabaran Program dan Kegiatan dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi untuk mencapai Visi dan Misi, dalam meningkatkan kinerja aparatur yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama Setda Provinsi Jambi yang dikelola Biro-Biro lingkup Setda diarahkan pada tupoksi masing-masing Biro disesuaikan dengan intensitas dan beban kerja masing-masing, agar pencapaian visi dan misi lebih optimal.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Setda Provinsi Jambi

2.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi Setda dalam melaksanakan pembangunan adalah terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan secara berdayaguna dan berhasil guna serta memberikan pelayanan secara teknis administrasi kepada seluruh

jajaran pemerintahan ditingkat Provinsi, dan pelaksanaan koordinasi administrasi pemerintahan pada tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

2.1.2. Sasaran

Sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jambi yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan dan sasaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincih, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

2.2. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,

Sebagai upaya menunjang terwujudnya visi Provinsi Jambi yakni ***Terwujudnya Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah ridho Allah SWT.***

Misi Provinsi Jambi yaitu:

- a. Memantapkan Tata kelola Pemerintahan.
- b. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.
- c. Memantapkan Kualitas sumber Daya Manusia.

2.3. Strategi

Strategi Merupakan Suatu Cara Untuk Merespon Isu Strategis yang dihadapi atau untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan Strategi sebagai suatu cara atau Pola untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Makna strategis dari beberapa ungkapan yang terkandung dalam visi dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, kerukunan umat beragama.
3. Mewujudkan pelayanan informasi daerah yang berimbang, kokohnya interaksi sosial, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dan inovasi.

2.4. Kebijakan

Kebijakan rencana kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi berupa metode untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi untuk Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang secara garis besarnya diarahkan dapat membantu Sekretaris Daerah dalam rangka perumusan bahan-bahan pembinaan dan kebijakan penyelenggaraan di bidang organisasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.

2.5. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. dalamnya dituangkan kedalam indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan

syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tabel 1. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Perjanjian Kinerja Kepala Biro



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MAHRUP, M. Si.**
Jabatan : **Pjt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S. Sos., M. H.**
Jabatan : **Gubernur Jambi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Maret 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAMBI,

Pihak Pertama
Pjt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. H. AL HARIS, S. Sos., M. H.


Drs. MAHRUP, M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19730228 199201 1 001

RANCANGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi	61,50


Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 335.061.450	APBD
2. Penataan Organisasi	Rp. 1.334.881.500	APBD
Jumlah	Rp. 1.669.942.950	

Jambi, Maret 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAMBI,

Pihak Pertama
PIL. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. H. AL HARIS, S. Sos., M. H.


Drs. MAHRUP, M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19730228 199201 1 001

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website: www.jambiprov.go.id.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. MAHRUP, M. Si
Jabatan : Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : OTIN SUPANDI, S. Sos.
Jabatan : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Biro Organisasi

Pihak Pertama
Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab

OTIN SUPANDI, S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620215 198503 1 007


DRS. MAHRUP, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730228 199201 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tangguh dan handal	Nilai Tingkat Kematangan Kelembagaan Daerah Provinsi. Persentase kelembagaan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata tingkat kematangan "sedang". Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi dan prestasi unit "Sangat Baik".	1209 18,18% (2 Kab/Kota) 93% (40 Perangkat Daerah)

Pagu Anggaran Bagian Kelembagaan dan Anjab:

Rp. 803.750.140 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh seratus empat puluh rupiah).

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Biro Organisasi

Pihak Pertama
Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab

OTIN SUPANDI, S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620215 198503 1 007


DRS. MAHRUP, M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19730228 199201 1 001

Perjanjian Kinerja Subbagian Kelembagaan Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JUHAR MUKHLAS, S.Pd. I
Jabatan : Kasubbag Kelembagaan Provinsi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : DRS. MAHRUP, M. Si
Jabatan : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Kepala Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

DRS. MAHRUP, M. Si
Pembina TK. I
NIP. 19730228 199201 1 001

Jambi, Januari 2022


Pihak Pertama
Kepala Subbagian Kelembagaan
Provinsi

JUHAR MUKHLAS, S. Pd. I
Penata Tk. I
NIP. 19781118 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN PROVINSI
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai terhadap tingkat Kematangan organisasi Daerah. - Jumlah Buku Gambaran Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi - Jumlah pelaksanaan Rakor Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jambi - Jumlah pelaksanaan Rakor Penataan UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi - Jumlah UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang terevaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - Jumlah usulan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang diproses 	<p>43 Perangkat Daerah</p> <p>1 Buku</p> <p>1 Kali</p> <p>1 Kali</p> <p>5 UPTD</p> <p>3 Perangkat Daerah</p>

Pihak Kedua
Kepala Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan


DRS. MAHRUP, M. Si
Pembina TK. I
NIP. 19730228 199201 1 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Kelembagaan
Provinsi


JUHAR MUKLAS, S.Pd. I
Penata Tk. I
NIP. 19781118 200801 1 001

Perjanjian Kinerja Subbagian Analisis Jabatan



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWAN, SE.**
Jabatan : Kasubbag Analisis Jabatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MAHRUP, M.Si.**
Jabatan : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

Drs. MAHRUP, M.Si.
Pembina TK. I
NIP. 19730228 199201 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Analisis Jabatan

ERWAN, SE
Penata
NIP. 19770531 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**KASUBBAG ANALISIS JABATAN
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efisiensi Unit (EU) dan Prestasi Unit (PU) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Frekuensi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan	3 Kali
		Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kab/Kota	11 Kab/Kota
		Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	19 Dokumen
		Jumlah Dokumen Validasi ulang Evaluasi Jabatan Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Evaluasi Penyusunan Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	33 Perangkat Daerah
		Jumlah Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pratama Pemerintah Provinsi Jambi	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penataan Analisis Jabatan	Rp.137.617.500,-	APBD

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Kelembagaan
dan Analisis Jabatan



Drs. MAHRUP, M.Si.
Pembina TK. I
NIP. 19730228 199201 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Analisis Jabatan



ERWAN, SE
Penata
NIP. 19770531 200701 1 005

Perjanjian Kinerja Kelembagaan Kab/Kota



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambi.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NENY HERIANTI. H, S.S.**
Jabatan : Kasubbag Kelembagaan Kabupaten/Kota

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MAHRUP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab,

Drs. MAHRUP, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19730228 199201 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Kelembagaan Kab/Kota,

NENY HERIANTI. H, S.S.
Penata Tk.I
NIP. 19810519 200501 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KASUBBAG KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan kelembagaan daerah Kabupaten/Kota yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.	Jumlah Kab/Kota yang dibina	11 Kab/Kota
		Jumlah pelaksanaan Rakor Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	1 kali
		Persentase Fasilitasi Raperbup/Raperwal/Perbup/Perwal yang dievaluasi	100 %
		Persentase Raperda yang dievaluasi	100 %

Kegiatan

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota

Anggaran

Rp 180.709.000,-

Keterangan

APBD

Pihak Kedua
Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab,



Drs. MAHRUP, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19730228 199201 1 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama
Kasubbag Kelembagaan Kabupaten/Kota,



NENY HERIANTI, H. S.S.
Penata Tk. I
NIP. 19810519 200501 2 009

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISMAIL, S.E.**
Jabatan : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **OTIN SUPANDI, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Biro Organisasi,

OTIN SUPANDI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620215 198503 1 007

Pihak Pertama
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja

ISMAIL, S.E.
Pembina
NIP. 19740217 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase pemenuhan PMPRB Pemerintah Provinsi Jambi	61,50
		2. Persentase Kab/Kota dengan predikat RB minimal "B"	18
		3. Persentase Perangkat Daerah dengan predikat akuntabilitas kinerja minimal "BB"	27
		4. Persentase Kab/Kota dengan predikat akuntabilitas kinerja minimal "BB"	18
		5. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengembangan budaya kerja	11

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 463.502.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 463.502.000,-	APBD

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Biro Organisasi,



OTIN SUPANDI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620215 198503 1 007

Pihak Pertama
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja



ISMAIL, S.E.
Pembina
NIP. 19740217 199803 1 001

Perjanjian Kinerja Kasubbag Reformasi Birokrasi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LAMHOT TS, S.E.**
Jabatan : Kasubbag Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ISMAIL, S.E.**
Jabatan : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja

ISMAIL, S.E.

Pembina
NIP. 19740217 199803 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Reformasi Birokrasi

LAMHOT TS, S.E.

Penata TK.I
NIP. 19770915 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KASUBBAG REFORMASI BIROKRASI
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Serta Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kab/Kota	1 kali
		Frekwensi Monitoring pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi.	1 kali
		Frekwensi Pelaksanaan koordinasi/Konsultasi/ Study Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	5 kali
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Penguatan Reformasi Birokrasi	11 Kab/Kota

Kegiatan

1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Anggaran

Rp. 137.248.000,-

Keterangan

APBD

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja



ISMAIL, S.E.
Pembina
NIP. 19740217 199803 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Reformasi Birokrasi



LAMHOT TS, S.E.
Penata TK.I
NIP. 19770915 200012 1 003

Perjanjian Kinerja Kasubbag Akuntabilitas Kinerja



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. ANDRI RIANDI, S.I.P., M.M.**
Jabatan : Kasubbag Akuntabilitas Kinerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ISMAIL, S.E.**
Jabatan : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja

ISMAIL, S.E.
Pembina
NIP. 19740217 199803 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Akuntabilitas Kinerja

R. ANDRI RIANDI, S.I.P., M.M.
Penata
NIP. 19820619 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KASUBBAG AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya sinergitas implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Reviu Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	43 OPD
		Jumlah Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	43 OPD
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi	2 kali
		Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi	1 Lap
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam penguatan SAKIP	11 Kab/Kota
		Frekwensi Monitoring Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2 kali
		Frekwensi Pelaksanaan koordinasi/konsultasi/asistensi/studi pembelajaran penguatan SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi	2 kali
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota oleh Kemenpan RB	1 kali

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Rp. 219.905.000,-

APBD

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja

Pihak Pertama
Kasubbag Akuntabilitas Kinerja

ISMAIL, S.E.
Pembina
NIP. 19740217 199803 1 001

R. ANDRI RIANDI, S.I.P., M.M.
Penata
NIP. 19820619 201001 1 011

Perjanjian Kinerja Budaya Kerja



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rts. ROSIATY, S.H.**
Jabatan : Kasubbag Budaya Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ISMAIL, S.E.**
Jabatan : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
Dan Akuntabilitas Kinerja

ISMAIL, S.E.
Pembina
NIP. 19740217 199803 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Budaya Kerja

Rts. ROSIATY, S.H.
Penata TK.I
NIP. 19670822 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KASUBBAG BUDAYA KERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Sosialisasi Nilai-nilai Dasar dan <i>Employer Branding</i> ASN lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	11 Kab/ Kota
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang Menerapkan Budaya Kerja	5 OPD
		Jumlah Pelaksanaan FGD Budaya Kerja	1 Kali
		Jumlah Sosialisasi Nilai-nilai Dasar dan <i>Employer Branding</i> ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD

Program

Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan

1. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

Anggaran

Rp. 106.349.000

Keterangan

APBD

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
Dan Akuntabilitas Kinerja

ISMAIL, S.E.

Pembina

NIP. 19740217 199803 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Budaya Kerja

Rts. ROSIATY, S.H.

Penata TK.I

NIP. 19670822 199503 2 001

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tatalaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARIYANTO, S.Sos.**
NIP : 19700106 199002 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Tatalaksana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **OTIN SUPANDI, S.Sos**
NIP : 19620215 198503 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 20 Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Biro Organisasi,

OTIN SUPANDI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620215 198503 1 007

Pihak Pertama
Kepala Bagian Tatalaksana,

HARIYANTO, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19700106 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA BAGIAN TATALAKSANA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

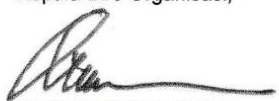
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Jambi.	1. Rata-rata Nilai IKM Biro Organisasi	88,31
		2. Nilai Akuntabilitas Biro Organisasi	70 (BB)
		3. Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah Provinsi Jambi	83
		4. Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jambi Yang Memiliki Peta Proses Bisnis	9,30 %
		5. Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jambi Yang Memiliki SOP	34,88 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 60.854.000,-	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 242.157.450,-	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 32.050.000,-	APBD
4. Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 304.608.000,-	APBD

Jumlah Rp. 639.669.450,-

Jambi, 20 Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Biro Organisasi,



OTIN SUPANDI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620215 198503 1 007

Pihak Pertama
Kepala Bagian Tatalaksana,



HARIYANTO, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19700106 199002 1 001

Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Laksana Pemerintahan



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ACHYAR**
Jabatan : Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARIYANTO, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Bagian Tatalaksana

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tatalaksana,

HARIYANTO, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19700106 199002 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan

Drs. ACHYAR
Penata Tk. I
NIP. 19681027 199009 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

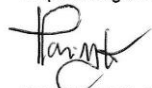
KASUBBAG TATALAKSANA PEMERINTAHAN
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerapan Ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Sosialisasi Peta Proses Bisnis	3 kali
		Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	8 PD
		Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Peta Proses Bisnis	4 PD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp. 121.850.000,-	APBD

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tatalaksana,



HARRYANTO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 1970106 199002 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan,



Drs. ACHYAR

Penata TK.I

NIP. 19681027 199009 1 001

Perjanjian Kinerja Kasubbag Pelayanan Publik



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADHA FARIZA, M. KOM**
Jabatan : Kasubbag Pelayanan Publik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARIYANTO, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bagian Tata Laksana

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 03 Januari 2022

Pihak Kedua
Plt. Kepala Bagian Tata Laksana

HARIYANTO, S. Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19700106 199002 1 002

Pihak Pertama
Kasubbag Pelayanan Publik

ADHA FARIZA, M. KOM
Penata
NIP. 19811010 201001 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Subbag Pelayanan Publik	1 dok
		Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik	1 kali
		Jumlah pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	1 kali
		Jumlah Asistensi Pemenuhan Aspek Indikator Indeks Pelayanan Publik Unit Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3 UPP
		Jumlah Asistensi Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Perangkat Daerah	43 OPD
		Jumlah pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota
		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Daerah	1 kali
		Frekuensi monitoring capaian kinerja peningkatan kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4 kali

Program

Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Rp. 182.758.000,-

APBD

Jambi, 03 Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Laksana

Pihak Pertama
Kasubbag Pelayanan Publik



HARIYANTO, S.Sos

Pembina

NIP. 19700106 199002 1 002



ADHA FARIZA, M.KOM

Penata

NIP. 19811010 201001 1 017

Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Usaha



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDILLAH, S. E.**
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARIYANTO, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Bagian Tatalaksana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tatalaksana

HARIYANTO, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19700106 199002 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Tata Usaha

ABDILLAH, S. E.
Penata
NIP. 19850302 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**KASUBBAG TATA USAHA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat Biro	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket
		Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya dalam 1 tahun	400 orang
		Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket
		Jumlah survei indeks kepuasan masyarakat Biro yang dilaksanakan	4 kali
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Biro	Jumlah dokumen perencanaan Biro yang disediakan	3 dok
		Jumlah dokumen RKA Biro yang disediakan	2 dok
		Jumlah dokumen DPA Biro yang disediakan	2 dok
		Jumlah laporan capaian kinerja Biro yang disediakan	6 lap
		Jumlah laporan evaluasi kinerja Biro yang disediakan	2 lap

Program

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran
Rp. 36.126.000,-

Keterangan
APBD

Program

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran
Rp. 74.883.600,-
Rp. 19.692.250,-
Rp. 47.545.000,-
Rp. 100.036.000,-

Keterangan
APBD
APBD
APBD
APBD

Program

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran
Rp. 32.050.000,-

Keterangan
APBD

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tatalaksana

HARIYANTO, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19700106 199002 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Tata Usaha

ABDILLAH, S.E.

Penata

NIP. 19850302 201101 1 004

Disini dapat kita jelaskan bahwa Tidak ada perbedaan antara target Kinerja pada renja Tahun 2022 dengan sajian tabel kinerja diatas.

Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perjanjian kinerja Biro Organisasi Setda tersebut dimanfaatkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 **Terwujudnya Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah ridho Allah SWT** dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 Misi 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi.	$\frac{\text{Persentase Capaian Area RB}}{\text{Persentase Target Area RB}} \times 100$	Perangkat Daerah terkait dan Hasil Survei Eksternal Kementerian Terkait	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi.	61,50

2.6. Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan KUA-PPAS yang diberikan, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mendapat pagu anggaran sebesar **Rp. 1.669.942.950**, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mendapat penambahan anggaran sebesar **17,75% (296.518.430,-)** sehingga pagu anggaran Biro Organisasi menjadi **Rp. 1.966.461.380,-**. Mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Biro Organisasi mempunyai 2 Program, 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 3 Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 66.624.300,-**.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 356.508.330,-**.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 38.950.000,-**.

II. Program Penataan Organisasi meliputi 2 Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 602.249.500,-**
2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 902.129.250,-**

Berikut gambaran program/keg/sub keg Biro Organisasi beserta tahapan pelaksanaannya.

Program/Keg/Sub Keg	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Tahapan Pelaksanaan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,126,000	41,896,300	1. Menyusun Dokumen Program dan Kegiatan Biro. 2. Melaksanakan rapat perencanaan Biro. 3. Melaksanakan perjalanan dinas Koordinasi dan sinkronisasi ke luar daerah dalam rangka sinergitas penyusunan perencanaan sub kegiatan teknis Biro. 4. Menyusun Dokumen Renstra/Renja Biro.
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,963,000	9,963,000	Menyusun RKA Biro
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6,885,000	6,885,000	Menyusun DPA Biro
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,635,000	4,635,000	1. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Biro. 2. Menyusun Laporan Realisasi Capaian dan Kinerja Biro.
5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,245,000	3,245,000	1. Menyusun Dokumen Evaluasi Biro. 2. Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Mengevaluasi Kinerja Biro.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,883,600	76,709,980	Menyediakan Kebutuhan Alat Tulis Kantor Biro
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,692,850	19,692,850	Menyediakan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biro
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	47,545,000	47,694,500	Mencetak Map Biro, Map Bagian, Kop Gubernur, Setda dan Mengandakan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,036,000	212,411,000	Melaksanakan Rapat- Rapat Koodinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,050,000	38,950,000	Memelihara Peralatan Kerja (PC/Laptop/Printer/lemari berkas/filing kabinet)
II. Program Penataan Organisasi			
4. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
1) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	248,445,000	248,445,000	1. Melaksanakan Rakor Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. 2. Mengusulkan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang diproses. 3. Melaksanakan Rakor Penataan UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 4. Mengevaluasi UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Peraturan per Undang-Undangan. 5. Menyusun Buku Gambaran Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

2) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	180,709,000	211,187,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rakor Kelembagaan Kabupaten/ Kota. 2. Persentase fasilitas Raperbub/Raperwal/Perbub/Perwali yang dievaluasi. 3. Persentase Raperda yang dievaluasi. 4. Melaksanakan Pembinaan Kab/Kota.
3) Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	137,617,500	142,617,500	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Monev Penyusunan Anjab, ABK, Efjab Pemerintah Kab/Kota. 2. Indeks tingkat Efisiensi unit (EU) dan Prestasi Unit (PU) Pemerintah Provinsi Jambi. 3. Mengevaluasi Dokumen Anjab dan ABK Hasil Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. 4. Mengevaluasi Dokumen Evjab Hasil Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. 5. Melaksanakan Bimtek Standar Kompetensi Jabatan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi 6. Melaksanakan Bimtek Anjab, ABK dan Evjab Hasil Penataan Kelembagaan PD Pemprov Jambi 7. Menyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Provinsi Jambi 8. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Menyusunan Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan serta Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrator di Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
1) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	137,248,000	160,399,400	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Monitoring Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi. 2. Melakukan Pembinaan dan Monitoring Penguatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/ Kota. 3. Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat "B" 4. Melakukan Koordinasi/ Konsultasi/Asistensi/ Studi Pembelajaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi.
2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	219,905,000	268,391,850	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2. Melakukan Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi 3. Melaksanakan Rapar Kerja Tim Penguatan SAKIP Provinsi Jambi 4. Melakukan Monitoring Terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah. 5. Melakukan Pembinaan terhadap Kab/Kota dalam rangka Penguatan SAKIP 6. Melakukan Koordinasi/ Konsultasi/Asistensi/ Studi Penguatan SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi. 7. Memfasilitasi Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Pemprov Jambi dan Kab/ Kota oleh Kementerian PAN RB. 8. Nilai AKIP Pemerintah Provinsi Jambi 9. Laporan Kinerja Pemprov Jambi
3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	106,349,000	168,730,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menerapkan Budaya Kerja 2. Melaksanakan FDG Budaya Kerja.

			3. Sosialisasi Nilai-nilai Dasar dan Employer Branding ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi 4. Sosialisasi Nilai-nilai Dasar dan Employer Branding ASN lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
4) Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana	121,850,000	121,850,000	1. Melakukan Pendampingan Penyusunan SOP Perangkat Daerah. 2. Melakukan Pembinaan Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
5) Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	182,758,000	182,758,000	1. Melaksanakan Fasilitas dan Pembinaan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 2. Melaksanakan Rakor Teknis Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik 3. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat 4. Melaksanakan Pembinaan/Asistensi dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah 5. Proposal Inovasi Pelayanan Publik 6. Melakukan Monitoring Evaluasi/Asistensi Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah.
Total : 2 Program 5 Kegiatan 18 Sub Kegiatan	1,669,942,950	1,966,461,380	

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menguraikan secara detail tentang kinerja aktual Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai wujud akuntabilitas kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selama Tahun 2022 yang sudah direncanakan sebelumnya melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang kemudian dituangkan lagi ke dalam kontrak kerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

BAB III berisi :

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran kinerja secara umum yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang

A. Capaian Kinerja Biro

Adapun capaian kinerja sasaran Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 terlihat pada form pengukuran kinerja. Capaian kinerja merupakan wujud aktual sesuai dengan indikator sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk itu, berikut ini dilakukan pengukuran tingkat realisasi dan pembahasan akuntabilitas selama Tahun 2022.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 1
Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi.	61,50	62,74	102
2	Meningkatnya Kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang Tangguh dan Handal	Nilai Tingkat Kematangan Kelembagaan	1209	1352	111
		Persentase Kelembagaan Daerah Kab/Kota dengan Rata-rata Tingkat Kematangan "Sedang"	18,18% 2 Kab/kota	18,18% 2 Kab/kota	100
		Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi dan	93 40 Perangkat Daerah	93 40 Perangkat Daerah	100

		persentasi unit "sangat baik"			
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Kab/Kota dengan Predikat RB minimal "B"	18	18	100
		Persentase Perangkat Daerah dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja minimal "BB"	27	27	100
		Persentase Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja minimal "BB"	18	9	50
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengembangan Budaya Kerja	11	9	81,81
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Prov Jambi	Rata-rata Nilai IKM Biro Organisasi	88,31	88,74	100,4
		Nilai Akuntabilitas Biro Organisasi	70 (BB)	77,05	111
		Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah Provinsi Jambi	83	84,32	102
		Persentase Paerangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki Peta Proses Bisnis	9,30 4 PD	9,30 4 PD	100
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki SOP	18,60 8 PD	18,60 8 PD	100
	Jumlah				96,78%

Dari Tabel di atas dapat diterangkan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan RB Realisasi Masih Memakai Nilai pada Tahun 2021 karna Nilai Tahun 2022 akan dikeluarkan oleh MENPAN RB pada bulan Maret Tahun 2023.
2. Nilai Tingkat Kematangan kelembagaan Daerah tercapai sebesar **111** Melebihi Target yang ditentukan atau dengan kategori **Sangat Memuaskan**, ini merupakan sebuah Prestasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepannya.
3. Persentase Kelembagaan Daerah Kab/Kota dengan rata-rata tingkat Kematangan “sedang” terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan.
4. Persentase Kab/kota dengan Predikat Reformasi Birokrasi terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Persentase Perangkat Daerah dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Minimal “BB” terealisasi sesuai dengan target yang di tentukan.
6. Belum tercapainya target Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja
7. Minimal “BB”, realisasi Perangkat Daerah dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Minimal “BB” pada Tahun 2022 adalah sebesar 9% dari target yang ditetapkan sebesar 18%.
8. Belum tercapainya target Perangkat Daerah yang melaksanakan pengembangan Budaya Kerja, ralisasi pada Tahun 2022 sebesar **9 %** dari target yang ditetapkan **11 %**.
9. Nilai IKM Biro Organisasi Terealisasi melebihi Target yang ditentukan dengan capaian **107%** atau dikategorikan **Sangat Memuaskan**.
10. Nilai Akuntabilitas Biro Organisasi Terealisasi melebihi Target yang ditentukan dengan capaian **111%** atau dikategorikan **Sangat Memuaskan**.
11. Nilai IKM Perangkat daerah Provinsi jambi Terealisasi melebihi Target yang ditentukan dengan capaian **102%** atau dikategorikan **Sangat Memuaskan**.
12. Perangkat Daerah Provinsi jambi yang memiliki Peta Proses Bisnis dan

Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki SOP terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan.

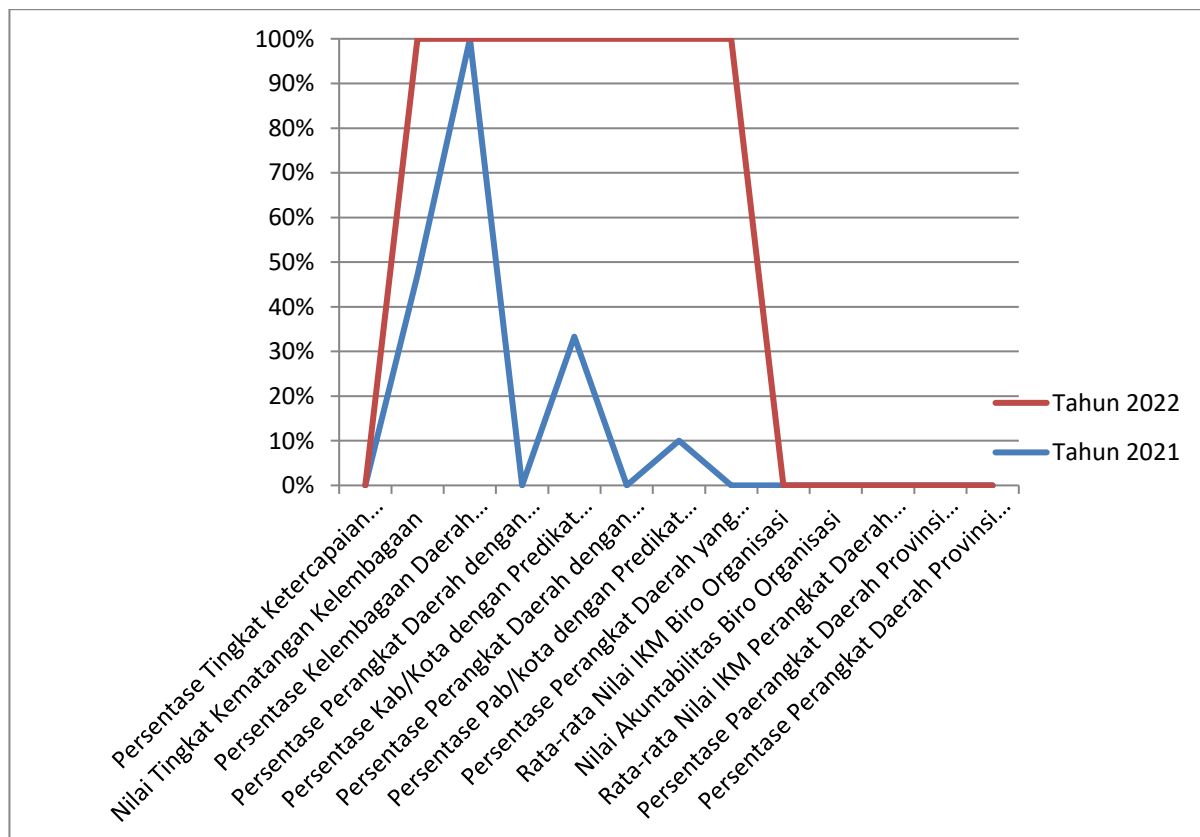
2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu 2021

Tabel 2
Perbandingan realisasi kinerja

No.	Sasaran	Indikator Outcome	Capaian 2021			Capaian 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi.	60,50	62,74	103,70	61,50	62,74	102
2.	Meningkatnya Kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang Tangguh dan Handal	Nilai Tingkat Kematangan Kelembagaan	1204	1204	100	1209	1352	111
		Persentase Kelembagaan Daerah Kab/Kota dengan Rata-rata Tingkat Kematangan “Sedang”	9% (1 Kab/ko ta)	9% (1 Kab/kota)	100	18,18 % 2 Kab/k ota	18,18% (2 Kab/kota)	100
		Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi dan persentasi unit “sangat baik”	72,09 (31 PD)	72,09 (31 PD)	100	93 40 Perang kat Daera h	93 40 Perangka t Daerah	100
3.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Kab/Kota dengan Predikat RB minimal “B”	9 (1 Kab/ko ta)	9 (1 Kab/kota)	100	18	18	100
		Persentase Perangkat Daerah dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja minimal “BB”	32,55 (14 PD)	32,55 (14 PD)	100	27	27	100
		Persentase Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja minimal “BB”	9 (1 Kab/ko ta)	9 (1 Kab/kota)	100	18	9	50
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengembangan Budaya Kerja	2,32 (1 PD)	2,32 (1 PD)	100	11	9	81,81

No.	Sasaran	Indikator Outcome	Capaian 2021			Capaian 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Prov Jambi	Rata-rata Nilai IKM Biro Organisasi	88,10	87,09	98,85	88,31	88,74	100,4
		Nilai Akuntabilitas Biro Organisasi	70	77,05	111	70 (BB)	77,05	111
		Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah Provinsi Jambi	83,60	83,72	100,14	83	84,32	102
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki Peta Proses Bisnis sesuai dengan permen PAN No.19 Tahun 2018	4,65 (2 PD)	4,65 (2 PD)	100	9,30 4 PD	9,30 4 PD	100
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki SOP sesuai dengan Permendagri No.52 Tahun 2011	9,30 (4 PD)	9,30 (4 PD)	100	18,60 (8 PD)	18,60 (8 PD)	100

Selain itu kita juga dapat gambarkan capaian kinerja kedalam diagram sebagai berikut:



3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Biro Organisasi.

No.	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026(%)
			2022		
1.	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi.	60,80	62.74	65,00	96,52
2.	Nilai Tingkat Kematangan Kelembagaan	1.204	1.352	1.634	82,74
3.	Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	100	100	100	100
4.	Indeks Tingkat Efisiensi Unit dan Persentasi Unit Pemerintah Prov.Jambi	1,2	1.19	1,7	70
5.	Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Reformasi Birokrasi "B"	9	27	54	50
6.	Persentase PD Pemprov dengan Predikat Akuntabilitas $\geq B$	18,6	86	41,86	205
7.	Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas $\geq B$	72,8	100	100	100
8	Persentase PD yang menerapkan Budaya Kerja	22	11.62	81	14,34
9	Persentase Pemerintah Kab/Kota yang memiliki kebijakan Budaya Kerja	9	27.27	45	60,6
10	Persentase Paerangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki Peta Proses Bisnis sesuai dengan permen PAN No.19 Tahun 2018	4,65	61.16	100	61.16
12	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki SOP sesuai dengan Permendagri No.52 Tahun 2011	9,30	34.88	100	34.88
13	Persentase PD dengan IKM kategori "A"	9	20.93	60.46	34,61
14	Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan IKM kategori "B"	9	72.72	90.9	80
15	Rata-rata Nilai IKM Biro Organisasi	88,50	88,74	88,95	99,76
16	Nilai Akuntabilitas Biro Organisasi	64,50	77,05	77,25	99,74

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, ada permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi tahun 2022 antara lain :

- I. Dinamika Kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi.
- II. Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tuntas.
- III. Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward dan punishment.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Kementerian PAN dan RB)

Kementerian PANRB telah merumuskan visi Tahun 2020-2024 yang mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang profesional dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang Berkelas Dunia.

Untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian realisasi kinerja Biro Organisasi terhadap sasaran Renstra Biro dan Renstra Kementerian dilakukan review dengan hasil sebagaimana yang disajikan dalam Tabel berikut :

No	Sasaran pada Renstra (Biro Organisasi 2021-2026)			Sasaran pada Renstra K/L (Permenpan & RB 2020-2024)		
	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2026	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan RB	65%	Terwujudnya Birokasi yang Berkualitas, kapabel dan Berdaya Saing	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	Prov:70,01

5. Analisis Penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Berdasarkan capaian kinerja Biro Organisasi tahun 2022 dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran tercapai sebesar **96,78%** atau kategori sangat baik, dari 13 (tiga belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022, terdapat 2 (dua) realisasi indikator kinerja yang belum sesuai target sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan budaya kerja	11	9	81,81%
Persentase Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Minimal “BB”	18	9	50%

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain :

1. Dinamika kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi.
2. Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah dan tuntas.
3. Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

b. Alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan permasalahan di atas yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan siasat perubahan kinerja untuk mengurangi dampak penurunan kinerja dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta penggabungan kegiatan-kegiatan rapat koordinasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dengan menyisipkan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Di masa ekonomi yang serba terbatas baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran dan aktivitas kegiatan, dari total pagu anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebesar **1.966.461.380** Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi berhasil mencapai efisiensi sebesar **Rp.82.146.487,- atau 4,35%.**

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Biro Organisasi adalah sebagaimana dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Nilai Tingkat Kematangan Kelembagaan Daerah dengan target nilai 1.209 tercapai nilai 1.352 tercapai sebesar 111% melebihi dari target ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :
 - 1) Indikator Kegiatan persentase OPD yang mencapai nilai kematangan organisasi minimal 1.352 dengan target 1.209. Pencapaian target sebesar 111% atau dari 43 perangkat daerah yang difasilitasi, seluruh Perangkat Daerah telah memperoleh nilai kematangan di atas target yang ditentukan. Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui kegiatan Pengembangan efektivitas kelembagaan Perangkat Daerah. Target kinerja kegiatan jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan tercapai seluruhnya.

Pengukuran kematangan dilaksanakan berdasarkan amanat Permendagri 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

2) Indikator kegiatan persentase Kab/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi daerah minimal sedang dengan target 2 Kab/Kota. Pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 100% atau sebanyak 2 Kab/Kota. Kegiatan penunjang target kinerja ini adalah Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota. Kinerja dari kegiatan ini merupakan mandatory dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah terkait Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, tugas tugas ini meliputi fasilitasi atas pembentukan Perda Perbup dan Perwali tentang SOTK.

3) Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi dan prestasi unit “sangat baik” dengan target 93% atau 40 Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100% atau 40 Perangkat Daerah. Pembinaan Analisis jabatan dengan target kinerja kegiatan Tahun 2022 sebanyak 43 OPD dan 11 Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi anjab. Dalam Tahun 2022 dilaksanakan aktivitas yang menjadi unggulan di antaranya penyusunan standar kompetensi jabatan yang digunakan untuk penataan, pengangkatan dalam jabatan. Hasil dari aktivitas tersebut adalah Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Dokumen tersebut digunakan dalam pemetaan ASN berdasarkan kompetensi jabatan dan sebagai bahan penyediaan diklat bagi ASN dan Open bidding pejabat JPT. Kegiatan penunjang target kinerja ini adalah Kegiatan Penataan Anjab.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi dengan target 83% tercapai nilai 84,32% tercapai sebesar 102% melebihi dari target yang ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1) Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan dengan

target kinerja tahun 2022 sebesar 83% tercapai 84,32% atau terelisasi sebesar 102% melebihi dari Target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung capaian kinerja ini adalah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dengan target 88,31 (A) tercapai 88,74 (A) atau terealisasi sebesar 100,4% Kegiatan guna mendukung capaian kinerja ini adalah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan RB target 61,50 tercapai nilai 62,74 tercapai sebesar 102 % melebihi dari target yang ditetapkan, nilai yang dicantumkan masih memakai nilai Tahun 2021 karna Nilai Tahun 2022 akan dikeluarkan MENPAN RB pada bulan Maret Tahun 2022. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Persentase Kabupaten/Kota dengan Predikat RB Minimal “B” terealisasi 100% sesuai dengan target ditetapkan, Kegiatan guna mendukung target kinerja kegiatan ini adalah kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 2) Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat Akuntabilita Kinerja Minimal “BB” terealisasi 100% sesuai dengna Target yang ditetapkan, Kegiatan yang mendukung Target Kinerja adalah Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- 3) Persentase Kabupaten/Kota Dengan Predikat Akuntabilita Kinerja Minimal “BB” terealisasi 9 % dari target yang ditetapkan sebesar 18%, Kegiatan yang mendukung Target Kinerja adalah Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- 4) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengembangan Budaya Kerja terealisasi 9% dari Target 11%, Kegiatan yang mendukung kineja ini adalah evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja.
- 5) Nilai AKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dengan target 70 tercapai nilai 77,05 atau terealisasi sebesar 111% dari target

ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja kegiatan ini adalah kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 6) Niali IKM Biro Organisasi dengan Target 88,31 terealisasi sebesar 88,74 dengan Capaian 100,4 % melebihi target yang ditentukan, kegiatan ini mendukung target kinerja kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah dan kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Nilai IKM Perangkat Daerah Provinsi Jambi dengan Target 83 terealisasi sebesar 84,32 dengan capaian 102% kegiatan ini mendukung Kinerja Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik.
- 8) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB dengan target kinerja 43 perangkat daerah dan tercapai 100% atau seluruh perangkat daerah terfasilitasi. Kegiatan guna mendukung target kinerja kegiatan ini adalah kegiatan Pembinaan Pelaksanaan RB.
- 9) Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki Peta Proses Bisnis sesuai dengan permen PAN No.19 Tahun 2018 terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan ini mendukung kinerja Pengelolaan Tatalaksana.
- 10) Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang memiliki SOP sesuai dengan Permendagri No.52 Tahun 2011 terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100% Kegiatan guna mendukung target kinerja kegiatan ini adalah kegiatan Pengelolaan Tatalaksana.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2022, anggaran pendukung sebesar **RP. 1.966.461.380,-** (Satu miliar Sembilan ratus enam puluh enam empat ratus enam puluh satu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jambi dengan komposisi Penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 155.952.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa RP. 1.810.509.3800
3. Belanja Modal Rp. 0,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya perangkat daerah yang efektif, efisien serta tata kelola birokrasi yang kapabel dan berkinerja tinggi	Program Administrasi Umum	Rp.462.082.630	Rp.462.082.630	100%
	Program Penataan Organisasi	Rp.1.504.378.750	RP.1.422.232.263	94.53%
Jumlah Total		Rp.1.966.461.380	Rp.1.884.314.893	95.82%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran pada tahun 2022 terdapat efisiensi sebesar **Rp.82.146.487,-** atau **4,35%** dimana pagu yang ditetapkan sebesar **1.966.461.380,-** terealisasi sebesar **Rp.1.884.314.893,-**. Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas yang dioptimalkan.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

BAB IV berisi :
Kesimpulan Hasil Capaian
Kinerja

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 telah dapat dicapai dengan baik, karena tingkat capaian realisasi anggaran telah dicapai di angka **95.82%**. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas program pembangunan bidang kelembagaan dan Anjab, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja lingkup Provinsi Jambi yang dilaksanakan melalui Bagian-Bagian di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi berjalan dengan sangat baik. Hal ini telah menggambarkan bahwa komitmen jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam mendukung perwujudan visi Jambi, yakni **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dan Memantapkan Sumberdaya Manusia.**

Selanjutnya, secara keseluruhan, capaian kinerja dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2022 akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis sebagai upaya memecahkan permasalahan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2022, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi merumuskan langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah (solusi) yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih fleksibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja.
2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Biro Organisasi Setda dengan pihak-pihak terkait lainnya (*stakeholders*) dalam merumuskan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.
3. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem/Aplikasi yang telah ada.
4. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan media akuntabilitas tahun kelima untuk pelaksanaan Renstra 2021-2026. Namun demikian, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, sehingga implementasi sistem Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) diharapkan akan lebih baik pada masa mendatang.

Akhir kata, kami segenap Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2021 mengharapkan agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.



Pemerintah Provinsi Jambi

**BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
JAMBI**

**Jl. Jend. A. Yani No. 1
Telanaipura Jambi**